

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara)**

***THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, BALANCE FUND AND
CAPITAL EXPENDITURE ON THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT WITH
POPULATION AS A MODERATING VARIABLE
(Empirical Study on Regency / City in Southeast Sulawesi Province)***

**AZHAR SYARIFIN
A042202020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara)**

***THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, BALANCE FUND AND
CAPITAL EXPENDITURE ON THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT WITH
POPULATION AS A MODERATING VARIABLE
(Empirical Study on Regency / City in Southeast Sulawesi Province)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**AZHAR SYARIFIN
A042202020**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara)**

***THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, BALANCE FUND AND CAPITAL
EXPENDITURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL
GOVERNMENT WITH POPULATION AS A MODERATING VARIABLE
(Empirical Study on Regency / City in Southeast Sulawesi Province)***

disusun dan diajukan oleh

**AZHAR SYARIFIN
A042202020**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 30 Desember 2022

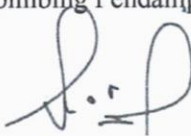
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

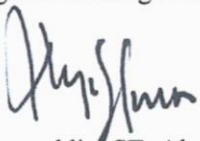
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musran Munizu, SE, M.Si., CIPM.
NIP. 197509092000121001


Dr. Sri Sundari, M.Si., Ak., CA.
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE, Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azhar Syarifin

NIM : A042202020



Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara)*.

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Januari 2023

Yang menyatakan,



Azhar Syarifin

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Musran Munizu, SE, M.Si., CIPM** dan Ibu **Dr. Sri Sundari, M.Si., Ak.,CA** sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada tim penguji, bapak **Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si**, bapak **Andi Aswan, SE., MBA., Ph.D** dan ibu **Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si** yang telah memberi saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga.
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi.
8. Teman, saudara seperjuangan kelas MKD atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi.
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Terima kasih kepada ayahanda Syarifin, ibunda Nuriani, saudara-saudara saya Beby Syarifin, Rofin Syarifin, Mulfin Syarifin dan Nur Sahara Syarifin atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2022

Penulis

ABSTRACT

AZHAR SYAFIRIN. *The Effect of Regional Original Revenue, Fiscal Balance Fund, and Capital Expenditure on the Financial Performance of Regional Governments with Population as a Moderating Variable: An Empirical Study in Regencies/Cities in Southeast Sulawesi Province* (supervised by Musran Munizu and Sri Sundari)

This study aims to determine (1) the effect of Regional Original Revenue (PAD) on the financial performance of local governments, (2) the effect of balance fund on the financial performance of local governments, (3) the effect of capital expenditure on the financial performance of local governments, (4) the effect of population in moderating the relationship between Regional Original Revenue (PAD) and the financial performance of local government, (5) the effect of population in moderating the relationship between balance fund and the financial performance of local governments, (6) the effect of population in moderating the relationship between capital expenditure and the financial performance of local governments. The population consisted of 17 regencies and cities in Southeast Sulawesi Province. The analysis method used was quantitative analysis with multiple linear regression model. The results show that Regional Original Revenue (PAD), balance fund, and capital expenditure simultaneously have an effect on the financial performance of local governments. However, the partial test results show that Regional Original Revenue (PAD) has a positive effect on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. Meanwhile, the balance fund and capital expenditure have a negative effect on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. The total population variable as a moderating variable can moderate the relationship between Regional Original Revenue (PAD) and the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. However, it can not moderate the relationship between balancing funds and capital expenditure on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province.

Keywords : regional original revenue (PAD), balance fund, capital expenditure, population, regional financial performance



ABSTRACT

AZHAR SYAFIRIN. *The Effect of Regional Original Revenue, Fiscal Balance Fund, and Capital Expenditure on the Financial Performance of Regional Governments with Population as a Moderating Variable: An Empirical Study in Regencies/Cities in Southeast Sulawesi Province* (supervised by Musran Munizu and Sri Sundari)

This study aims to determine (1) the effect of Regional Original Revenue (PAD) on the financial performance of local governments, (2) the effect of balance fund on the financial performance of local governments, (3) the effect of capital expenditure on the financial performance of local governments, (4) the effect of population in moderating the relationship between Regional Original Revenue (PAD) and the financial performance of local government, (5) the effect of population in moderating the relationship between balance fund and the financial performance of local governments, (6) the effect of population in moderating the relationship between capital expenditure and the financial performance of local governments. The population consisted of 17 regencies and cities in Southeast Sulawesi Province. The analysis method used was quantitative analysis with multiple linear regression model. The results show that Regional Original Revenue (PAD), balance fund, and capital expenditure simultaneously have an effect on the financial performance of local governments. However, the partial test results show that Regional Original Revenue (PAD) has a positive effect on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. Meanwhile, the balance fund and capital expenditure have a negative effect on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. The total population variable as a moderating variable can moderate the relationship between Regional Original Revenue (PAD) and the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province. However, it can not moderate the relationship between balancing funds and capital expenditure on the financial performance of local governments in the regencies/cities of Southeast Sulawesi Province.

Keywords : regional original revenue (PAD), balance fund, capital expenditure, population, regional financial performance



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	13
1.4.2 Kegunaan Praktis	13
1.5 Sistematika penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis.....	17
2.1.1 Kinerja	17
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah	18
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.4 Dana Perimbangan.....	27
2.1.5 Belanja Modal.....	30
2.1.6 Jumlah Penduduk.....	32
2.1.7 Teori Peacock Wiseman	32
2.1.8 Teori Kependudukan dari Malthus	34
2.1.9 Metode Cochrane – Orcutt.....	35

2.2	Tinjauan Empirik.....	35
-----	-----------------------	----

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1	Kerangka Konseptual.....	41
3.2	Hipotesis	42
3.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	42
3.2.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	43
3.2.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	44
3.2.4	Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating	45
3.2.4.1	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	45
3.2.4.2	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	46
3.2.4.3	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	47

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Jenis Penelitian	49
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
4.3	Populasi Penelitian	49
4.4	Metode Pengumpulan Data	50
4.5	Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel	51
4.5.1	Variabel Independen	52
4.5.2	Variabel Dependen	53
4.5.3	Variabel Moderating	54
4.6	Metode Analisis Data	54

4.6.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	55
4.6.1.1	Uji Normalitas	55
4.6.1.2	Uji Multikolinearitas.....	56
4.6.1.3	Uji Autokorelasi	56
4.6.1.4	Uji Heteroskedastisitas	57
4.6.2	Uji Hipotesis	57
4.6.2.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
4.6.2.2	Uji Statistik F.....	58
4.6.2.3	Uji Statistik t.....	59
4.6.2.4	Uji Selisih Nilai Mutlak (Absolut Residual)	60
4.6.2.5	Koefisien Determinasi	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Deskripsi Variabel Penelitian.....	62
5.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	64
5.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	64
5.2.1.1	Uji Normalitas	67
5.2.1.2	Uji Multikolinearitas.....	68
5.2.1.3	Uji Autokorelasi	68
5.2.1.4	Uji Heteroskedastisitas	69
5.2.2	Uji Hipotesis	70
5.2.2.1	Uji Statistik F.....	71
5.2.2.2	Uji Statistik t.....	72
5.2.2.3	Koefisien Determinasi	74
5.3	Pengujian Efek Moderasi Pada Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	74
5.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	74
5.3.1.1	Uji Normalitas	75
5.3.1.2	Uji Multikolinearitas.....	76

5.3.1.3	Uji Autokorelasi	77
5.3.1.4	Uji Heterokedastisitas	78
5.3.2	Uji Statistik F	79
5.3.3	Uji Nilai Selisih Mutlak (<i>Absolut Residual</i>) Variabel Moderating.....	80
5.3.4	Koefisien Determinasi	81
5.4	Pembahasan Hasil Penelitian	81
5.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	82
5.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	84
5.4.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	86
5.4.4	Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi	87
5.4.4.1	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	87
5.4.4.2	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	89
5.4.4.3	Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan Antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	89
 BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan.....	93
6.2	Keterbatasan Penelitian	92
6.3	Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA		
		96
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 – 2020 (Persen).....	5
Tabel 2.1 Kriteria Tolak Ukur Rasio Kemandirian.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Populasi Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Variabel Operasional.....	53
Table 4.3 Uji Autokorelasi	56
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Data	62
Table 5.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Table 5.3 Hasil Uji Korelasi <i>Spearman's Rho</i>	66
Table 5.4 Hasil Uji Normalitas Model Pertama.....	67
Table 5.5 Hasil Uji Multikolinieritas Model Pertama.....	68
Table 5.6 Hasil Uji Autokorelasi Model Pertama	69
Table 5.7 Hasil Uji Korelasi <i>Spearman's Rho</i> Model Pertama.....	70
Table 5.8 Hasil Uji Statistik F Model Pertama	71
Table 5.9 Hasil Uji Statistik t Model Pertama.....	72
Table 5.10 Koefisien Determinasi Model Pertama	74
Tabel 5.11 Hasil Uji Normalitas Model Kedua.....	75
Tabel 5.12 Hasil Uji Multikolinieritas Model Kedua.....	76
Tabel 5.13 Hasil Uji Autokorelasi Model Kedua.....	77
Tabel 5.14 Hasil Uji Korelasi <i>Spearman's Rho</i> Model Kedua	78
Tabel 5.15 Hasil Uji Statistik F Model Kedua	79
Table 5.16 Hasil Uji Selisih Nilai Mutlak (<i>Absolut Residual</i>)	80
Table 5.17 Koefisien Determinasi Model Kedua.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Diagram Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 -2020.....4
Gambar 3.1	Kerangka Konseptual41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah, salah satu strategi yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan diberikan otonomi dan desentralisasi diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan yang tinggi dan tingkat ketergantungan keuangan yang rendah kepada pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah akan memberikan manfaat kepada daerah karena semakin tinggi keleluasan daerah untuk mengatur dan menggunakan keuangan daerahnya untuk alokasi dana yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2009). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk

keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah, serta pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif (Kawedar, 2013).

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu (Saragih, 2020).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah daerah yang salah satunya adalah infrastruktur di daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan

dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71, 2010). Pada dasarnya belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Padahal pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Khairunnisa, 2018).

Menurut (Pilat, J. J., & Morasa, 2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Sedangkan menurut (Ardila, 2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik”.



Gambar 1.1
Diagram Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 -2020

Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, kinerja keuangan pemerintah daerahnya masih mencerminkan bahwa presentase rasio kemandirian keuangan masih terlihat cukup rendah hal ini dikarenakan kurang mampunya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara bergantung dengan pemerintah pusat. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kinerja keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki rasio kemandirian yang kurang stabil. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

Adapun Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 – 2020

No	Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Jumlah Penduduk	KK
1	Buton	2016	39,140,000,000	703,260,000,000	264,930,000,000	99,352	5.57
		2017	48,260,000,000	656,690,000,000	184,080,000,000	100,440	7.35
		2018	27,640,000,000	724,140,000,000	251,370,000,000	101,618	3.82
		2019	29,010,000,000	681,800,000,000	158,010,000,000	102,641	4.25
		2020	32,600,000,000	696,860,000,000	168,000,000,000	103,869	4.68
2	Muna	2016	42,460,000,000	1,072,050,000,000	411,970,000,000	215,442	3.96
		2017	80,530,000,000	1,001,960,000,000	287,010,000,000	218,680	8.04
		2018	46,810,000,000	1,018,150,000,000	237,970,000,000	221,343	4.6
		2019	50,690,000,000	1,122,650,000,000	246,530,000,000	224,099	4.52
		2020	64,050,000,000	1,104,300,000,000	229,070,000,000	227,289	5.8
3	Konawe	2016	57,700,000,000	939,160,000,000	271,260,000,000	238,067	6.14
		2017	97,590,000,000	907,590,000,000	293,410,000,000	244,324	10.75
		2018	76,710,000,000	901,790,000,000	209,040,000,000	249,010	8.51
		2019	97,080,000,000	1,306,450,000,000	247,690,000,000	254,695	7.43
		2020	144,030,000,000	1,193,450,000,000	281,580,000,000	260,411	12.07
4	kolaka	2016	72,320,000,000	935,160,000,000	304,660,000,000	246,918	7.73
		2017	122,420,000,000	890,860,000,000	256,010,000,000	251,520	13.74
		2018	101,140,000,000	947,580,000,000	255,880,000,000	256,827	10.67
		2019	112,250,000,000	1,099,530,000,000	353,910,000,000	261,664	10.21
		2020	117,420,000,000	1,018,440,000,000	295,110,000,000	266,069	11.53
5	konawe Selatan	2016	48,030,000,000	1,147,280,000,000	232,790,000,000	299,928	4.19
		2017	102,590,000,000	1,102,950,000,000	233,370,000,000	304,214	9.3
		2018	61,320,000,000	1,200,910,000,000	390,200,000,000	309,298	5.11
		2019	66,480,000,000	1,269,930,000,000	418,150,000,000	314,785	5.23
		2020	67,650,000,000	1,268,720,000,000	144,330,000,000	319,291	5.33
6	Bombana	2016	31,270,000,000	791,700,000,000	293,780,000,000	170,020	3.95
		2017	54,510,000,000	780,830,000,000	211,990,000,000	175,497	6.98
		2018	65,540,000,000	754,270,000,000	167,300,000,000	180,035	8.69

No	Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Jumlah Penduduk	KK
		2019	48,420,000,000	857,110,000,000	194,660,000,000	184,570	5.65
		2020	58,770,000,000	893,770,000,000	272,560,000,000	189,269	6.58
7	Wakatobi	2016	25,030,000,000	707,620,000,000	227,820,000,000	95,209	3.54
		2017	46,660,000,000	671,850,000,000	208,300,000,000	95,386	6.95
		2018	33,550,000,000	758,510,000,000	240,620,000,000	95,737	4.42
		2019	36,160,000,000	820,830,000,000	286,840,000,000	95,892	4.41
		2020	35,890,000,000	749,030,000,000	225,270,000,000	96,111	4.79
		8	Kolaka Utara	2016	40,250,000,000	761,850,000,000	281,590,000,000
2017	55,450,000,000			690,210,000,000	133,520,000,000	144,681	8.03
2018	46,070,000,000			747,080,000,000	118,980,000,000	147,863	6.17
2019	49,280,000,000			792,010,000,000	184,780,000,000	150,831	6.22
2020	52,490,000,000			773,260,000,000	219,250,000,000	153,669	6.79
9	Buton Utara	2016	12,830,000,000	596,530,000,000	229,330,000,000	61,124	2.15
		2017	26,050,000,000	586,780,000,000	187,460,000,000	62,088	4.44
		2018	15,270,000,000	597,930,000,000	167,150,000,000	63,070	2.55
		2019	24,230,000,000	618,910,000,000	142,090,000,000	64,072	3.91
		2020	20,340,000,000	580,310,000,000	122,860,000,000	64,993	3.51
10	Konawe Utara	2016	11,580,000,000	768,220,000,000	225,160,000,000	59,673	1.51
		2017	25,000,000,000	707,960,000,000	165,920,000,000	60,884	3.53
		2018	15,610,000,000	737,390,000,000	146,890,000,000	62,403	2.12
		2019	18,290,000,000	837,060,000,000	183,720,000,000	63,814	2.19
		2020	29,910,000,000	815,200,000,000	132,000,000,000	65,183	3.67
11	Kolaka Timur	2016	15,410,000,000	620,190,000,000	213,480,000,000	125,859	2.48
		2017	34,380,000,000	524,070,000,000	223,360,000,000	128,154	6.56
		2018	38,830,000,000	600,710,000,000	188,210,000,000	130,860	6.46
		2019	25,100,000,000	660,940,000,000	216,940,000,000	133,324	3.8
		2020	25,300,000,000	660,980,000,000	157,190,000,000	135,569	3.83
12	Konawe Kepulauan	2016	9,720,000,000	492,930,000,000	292,100,000,000	32,307	1.97
		2017	11,870,000,000	470,800,000,000	266,880,000,000	33,212	2.52
		2018	15,100,000,000	485,610,000,000	208,390,000,000	33,680	3.11
		2019	10,710,000,000	535,290,000,000	200,190,000,000	34,219	2
		2020	9,980,000,000	477,870,000,000	118,200,000,000	34,666	2.09
13	Muna Barat	2016	16,160,000,000	572,530,000,000	216,190,000,000	78,476	2.82
		2017	38,810,000,000	533,080,000,000	279,780,000,000	79,649	7.28
		2018	32,970,000,000	559,510,000,000	213,750,000,000	80,619	5.89
		2019	33,050,000,000	633,500,000,000	230,030,000,000	81,624	5.22
		2020	18,180,000,000	583,610,000,000	155,070,000,000	82,785	3.12
14	Buton	2016	4,500,000,000	525,020,000,000	231,340,000,000	90,159	0.86

No	Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Jumlah Penduduk	KK
	Tengah	2017	30,690,000,000	552,300,000,000	216,170,000,000	91,099	5.56
		2018	31,410,000,000	586,260,000,000	226,070,000,000	92,165	5.36
		2019	17,860,000,000	569,800,000,000	182,360,000,000	93,091	3.13
		2020	19,980,000,000	565,260,000,000	167,110,000,000	94,207	3.53
15	Buton Selatan	2016	7,670,000,000	483,240,000,000	145,750,000,000	78,218	1.59
		2017	8,490,000,000	467,020,000,000	183,450,000,000	79,053	1.82
		2018	25,860,000,000	535,760,000,000	146,550,000,000	79,979	4.83
		2019	14,990,000,000	553,490,000,000	157,310,000,000	80,784	2.71
		2020	19,880,000,000	559,560,000,000	157,350,000,000	81,752	3.55
16	Kota Kendari	2016	179,060,000,000	1,097,790,000,000	492,420,000,000	359,371	16.31
		2017	218,340,000,000	852,790,000,000	305,620,000,000	370,728	25.6
		2018	176,120,000,000	951,510,000,000	387,950,000,000	381,628	18.51
		2019	215,330,000,000	972,810,000,000	439,350,000,000	392,830	22.13
		2020	221,820,000,000	914,880,000,000	303,830,000,000	404,232	24.25
17	Kota BauBau	2016	69,320,000,000	775,780,000,000	298,960,000,000	158,271	8.94
		2017	106,400,000,000	698,440,000,000	270,930,000,000	162,780	15.23
		2018	67,320,000,000	698,770,000,000	178,230,000,000	167,519	9.63
		2019	85,980,000,000	739,830,000,000	204,310,000,000	171,802	11.62
		2020	87,010,000,000	701,520,000,000	161,860,000,000	176,224	12.4

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/> & <https://sultra.bps.go.id/>

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari tahun ketahun tidak stabil cenderung menurun. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang mampu untuk mengelolala Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara bergantung dengan pemerintah pusat.

Hal ini dapat diperjelas dengan beberapa uraian data pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Kabupaten Muna Barat kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 kinerja keuangannya meningkat sebesar 7,28 % dari tahun 2016 sebesar 2,82 %, namun kembali mengalami

penurunan berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 5,89 %, 5,22 % dan 3,12 %. Pada Kabupaten Bombana kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 kinerja keuangannya meningkat sebesar 6,98 % dari tahun 2016 sebesar 3,95 %, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,65 % dari tahun 2018 yang sebesar 8,69 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,58 %. Kinerja keuangan Kabupaten Buton Utara juga mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 2,15 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,44 % namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,55 % dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 3,91 % dan terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yaitu sebesar 3,51 %.

Selain pendapatan asli daerah, salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di daerah adalah dengan menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka, V., & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso, I., & Suparta, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya penelitian terdahulu yang juga dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan (Asri Yanti, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan (Irmayunita Tahir, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah & belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun dalam penelitian (Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini, 2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi pendapatan asli daerah semakin baik kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan kabupaten badung menurun. Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung menurun.

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian, yang berupa penarikan pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk maka akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan suatu daerah. Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah jumlah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003). Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et.al, 2015). Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisienya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin

banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula (Budi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Apakah dana perimbangan, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Apakah belanja modal, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
4. Apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?

5. Apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
6. Apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menguji secara empiris apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Untuk menguji secara empiris apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Untuk menguji secara empiris apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Untuk menguji secara empiris apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Untuk menguji secara empiris apakah jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan informasi bagi publik dan sebagai tambahan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi diperpustakaan Universitas Hasanuddin tentang kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara baik jangka panjang maupun jangka pendek.

5. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dapat dijadikan sebagai alternatif masukan untuk mengukur dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-bab yang akan di rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kerangka teoritis dan penggambaran teori yang melandasi penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi : kinerja, kinerja keuangan pemerintah, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan membahas mengenai kerangka konseptual dan hipotesis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Yang merupakan sebuah konsep untuk dapat memberikan gambaran, mengarahkan asumsi dan dugaan sementara terkait dengan variabel – variabel yang akan diteliti.

BAB IV METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan kriteria pengujian hipotesis.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian, analisis deskriptif, hasil penelitian, serta pembahasan atas hasil yang didapat dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, refleksi peneliti berkaitan dengan temuan atau kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran atau rekomendasi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Kinerja

Menurut Moeheriono (2012), kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Sedangkan menurut Rivai (2013), kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Kinerja juga merupakan prestasi yang diperoleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Kemungkinan tercapainya tujuan organisasi adalah karena upaya para pelaku yang terdapat pada suatu organisasi (Sutrisno, 2010). Sutrisno (2010) menjelaskan terdapat hubungan yang erat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Kinerja organisasi mungkin baik bila kinerja individu juga baik. Kinerja pegawai akan baik bila mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja keras, pemberian gaji sesuai dengan perjanjian, dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik.

Pengertian kinerja berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang dilaksanakan.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, I. P. & Agusti, 2016).

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Saragih, 2020).

Menurut (Wibowo, 2014) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat

deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Dalam melakukan menganalisis kinerja keuangan hendaknya seorang mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan, karena semakin baik tingkat kinerja keuangan perusahaan maka akan besar juga uang yang akan diterima. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan harus ada alat ukur yang digunakan untuk mengukurnya kinerja dan harga saham dimasa yang akan datang, alat ukur yang paling sering digunakan oleh investor dan perusahaan adalah analisis rasio keuangan, yakni analisis rasio dan rasio yang paling populer digunakan adalah rasio profitabilitas (Hanum, 2009).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat

mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2014)

Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah:

- a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input (Mardiasmo, 2009).

$$\text{Efisiensi KKPD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

- b. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin

tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2014).

$$\text{Kemandirian KKPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1 Kriteria Tolak Ukur Rasio Kemandirian

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0 % - 25 %	Rendah Sekali
25 % - 50 %	Rendah
50 % - 75 %	Sedang
75 % - 100 %	Tinggi

Sumber : (Halim, 2014)

- c. Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Halim, 2014).

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

- d. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2014).

$$\text{Efektivitas KKPD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang pendapatan daerah dalam hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan seluruh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Halim, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari PAD, jika rasio PAD semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. PAD diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber

dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun (Saragih, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah, sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau rate hotel.

b. Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita membeli makanan, dinamakan pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan nama PPN.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan di sini misalnya semua jenis pertunjukan yang dapat ditonton.

d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Bahan galian golongan c yang dimaksud dalam perundang-undangan misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat.

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman

Pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah, sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarann atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, yang antara lain:

- a. Bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (Budianto, B., & Alexander, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat kiriman dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain Pendapatan asli daerah (PAD), maka peningkatan penerimaan daerah dapat

dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (*revenue sharing*) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (pajak/bukan pajak)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasikan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dibagihasikan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), (Halim, 2014).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai

kegiatan fisik seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lain-lain sebagainya, (Halim, 2014).

2.1.5 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal, (Halim, 2014).

Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain :

1. Belanja Modal Tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan seluruh pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi dan jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik distribusi instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 - b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2012) yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari prosesproses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

2.1.7 Teori Peacock Wiseman

Teori ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Menurut Teori Peacock dan Wiseman (1961) (dalam Mangkoesoebroto, 1993) ialah analisis tentang penerimaan dalam pengeluaran pemerintah. Ketika pajak meningkat, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat dimana GNP yang meningkat, pengeluaran pemerintah akan semakin besar. Teori ini tentang tingkat toleransi pajak, dalam hal ini masyarakat memahami betul betapa pentingnya pajak yang diperlukan oleh pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Teori ini terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yakni, dalam pengeluaran pemerintah ada gangguan sosial aktivitas swasta

akan dialihkan ke aktivitas pemerintah. Gangguan ini akan berdampak pada pemerintah yang harus meminjam dana pada negara lain untuk membiayai hutang. Ketika gangguan sudah dapat diatasi maka akan muncul kewajiban pemerintah untuk pelunasan hutang serta membayar bunga kepada negara lain. Efek inspeksi (*inspection effect*) ialah gangguan yang akan muncul setelah mengalami peperangan. Efek konsentrasi (*concentration effect*) ialah gangguan sosial yang disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan dari swasta kepada pemerintah. Aktifitas pemerintah akan bertambah dalam ketiga efek tersebut dimana, setelah peperangan dapat diselesaikan tingkat pajak tidak akan dapat menurun kembali seperti sebelum peperangan terjadi (Mangkoesebroto, 1993).

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman (1961) didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya dalam Priambodo, 2015).

Berdasarkan hasil empiris penyelidikan Alan T. Peacock dan Jack Wiseman (1961) menekankan pada pola waktu, didapatkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat *continous growth*, melainkan seperti tangga rumah, yang istilahnya adalah *steplike*. Mengapa pengeluaran dan

penerimaan pemerintah berkembang seperti tangga rumah tersebut, dikarenakan tiga efek yang saling berhubungan meskipun dapat dipisahkan, yaitu *displacement effect*, *inspection effect*, dan *concentration effect*. Kenaikan yang bersifat menanjak disebabkan karena guncangan-guncangan sosial yang besar seperti perang dan depresi. Gangguan tersebut menimbulkan *displacement effect* yang berupa kenaikan pengeluaran dan pajak secara mutlak (Soepangat dalam Priambodo, 2015). Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal semakin besar dan semakin bertambah.

2.1.8 Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus (1798) dalam buku Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan (Mulyadi. S,2014) menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur (geometric progression, dari 2 ke 4,8,16,32 dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (arithmetic progression, dari 2 ke 4,6,8 dan seterusnya). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian. Apabila dijelaskan secara rinci teori Malthus menyatakan bahwa penduduk cenderung bertambah secara tak terbatas sampai mencapai batas persediaan makanan, dan permasalahan ini menimbulkan manusia saling bersaing dengan adanya persaingan ini maka akan ada manusia yang tersisih dan tidak

mampu memperoleh makanan. Penjelasan tersebut bisa diartikan semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula.

2.1.9 Metode Cochran - Orcutt

Metode Cochran-Orcutt merupakan metode yang digunakan untuk perbaikan bila suatu model regresi ditemukan terjadi autokorelasi. Ketika struktur autokorelasi tidak diketahui, maka untuk mengetahui nilai $\hat{\rho}$ (koefisien autokorelasi) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_i^n e_i e_{i-1}}{\sum_i^n e_{i-1}^2}, i = 2, 3, 4, \dots, n$$

Dimana e_i adalah nilai *error* pada observasi ke- i , e_{i-1} adalah nilai *error* pada observasi ke - $(i - 1)$ dan n adalah banyaknya observasi (Sumodiningrat, 1994).

2.2 Tinjauan Empirik

Terdapat beberapa penelitian tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
1.	Irmayunita Tahir, 2019	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, & belanja modal. Variabel Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Pendapatan asli daerah & belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Siti Nur Rochmah, 2015	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
		Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012)	dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislative, dan leverage. Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislative, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Asri Yanti, 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
4.	Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini, 2019	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian didapatkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan kabupaten badung menurun. Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah kabupaten Badung menurun.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
5.	Yuni Wijayanti, 2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014)	Variabel Independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kinerja keuangan daerah. Variabel dependen: belanja modal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
6.	Karimah Arify, 2017	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2016	Variabel Independen: belanja modal, pendapatan asli daerah. Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah. Variabel Moderating: pertumbuhan ekonomi.	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi antara pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
7.	Mulia Andirfa, 2016	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Kinerja Keuangan	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
8.	Nanda Dipa Prastiwi & Andri Waskita Aji, 2020	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Variabel dependen: Kinerja Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
		Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2018)	Pemerintah Daerah	<p>Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>b. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>c. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>d. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>e. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun</p>

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
9.	Tri Yuni Pratiwi, 2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 - 2016	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Anggaran 2013-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. b. Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. c. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
10.	Chrisna Dwi Heryanti, 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
				<p>b. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>d. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.</p>

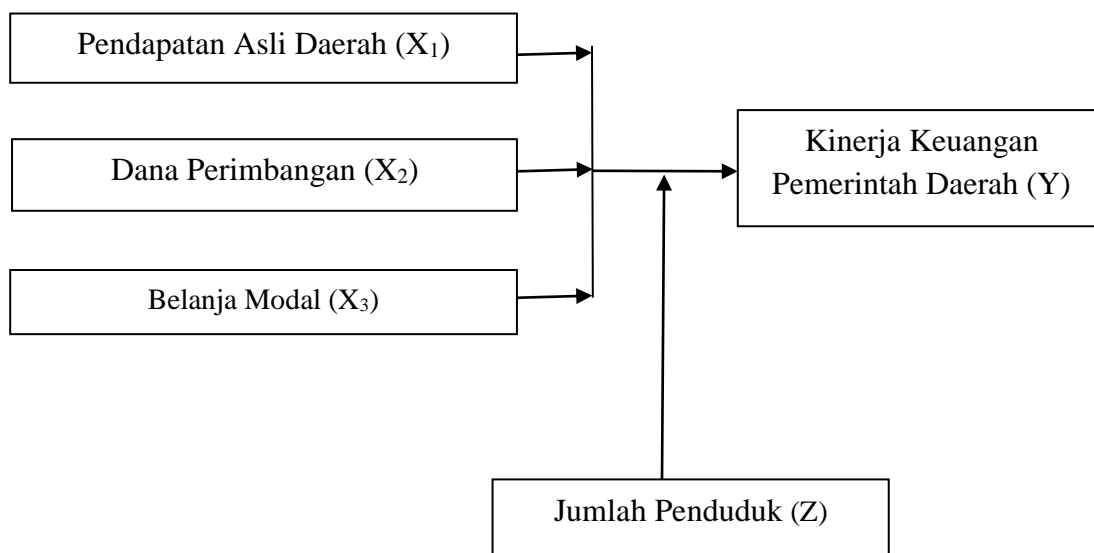
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat (Erlina, 2008).

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konsep terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah yang disebut variabel independen (X)

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (Y) serta Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi (Z). Berdasarkan kerangka konsep di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan, dimana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai ketersediaan jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau baik dalam membiayai

kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2016) bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya, akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun. Ini berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai

kebutuhan daerahnya semakin kuat dan semakin bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi apabila dana perimbangan rendah maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya juga semakin rendah.

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infratraktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi

kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

H₃ : Belanja Modal berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.4 Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating

3.2.4.1 Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian, yang berupa penarikan pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk maka akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru

akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003). Dengan demikian jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah.

H₄ : Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.4.2 Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Salah satu fungsi pemerintah daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerahnya adalah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik yang ada di daerahnya. Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah. Dengan demikian jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah.

H₅: Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan, dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.4.3 Jumlah Penduduk Memoderasi Hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et.al, 2015).

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula (Budi, 2013). Dengan demikian jumlah penduduk dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah.

H_6 : Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Belanja Modal, dengan kinerja keuangan pemerintahan daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.